

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunantahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misidan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA danPPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2016
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraanprogram pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunanhingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannyasebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar terlampir.

Visi KOTA BIMA Tahun 2005 – 2025 adalah “Terwujudnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan”, dan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2013 – 2018 adalah

"TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT", maka untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima menyusun Renja SKPD Tahun 2018. Renja SKPD ini diharapkan dapat terealisasi maksimal dalam KUA dan PPAS untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara nomor 4828);

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028.
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 111);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018.
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;
21. Keputusan Walikota Bima Nomor 506 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima Tahun 2018, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2018 *(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1. Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

**Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima
Periode tahun 2016 dan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018**

Nomor	Indikator Capaian			TARGET PENCAPAIAN			PROYEKSI TAHUN
	Indikator Capaian	Penjelasan	Satuan	Target Renstra	% capaian tahun 2016	% Capaian tahun 2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kriteria Kota Tangguh	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	%	100	100	103,636	100
2	Porsentase SDM Terlatih	Jumlah SDM Yang Tersedia	Orang	870	384,44	186,111	180
3	Persentase Keselarasan Pedoman Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen RPB, Dokumen Renkon Setiap Becana, SOP Kedaruratan dll	Dokumen	8	100	100	1
4	Persentase Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang dapat dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya dibagi jumlah korban	%	100	100	100	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Saat bencana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang harus ada x 100 %	%	85	70	100	85
5	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan Non Fisik Pasca Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang bisa ditangani/jumlah sarana dan prasarana yang terdampak bencana x 100	%	90	22	32	90
Rata – rata					125,35	103,11	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dari tahun ke tahun selalu mencapai target yang ditetapkan, dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di atas bahwa dari tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2016 rata-rata sebesar 125,35 %, sedangkan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2017 sebesar 103,11 %. Ini artinya menunjukkan tingkat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mengalami kenaikan atau mencapai target walaupun capaian kinerja di tahun 2016 lebih tinggi daripada capaian kinerja di tahun 2017.

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama tahun 2017 didukung oleh 40 pegawai yang terdiri dari 28 Pegawai Negeri Sipil dan 12 pegawai tidak tetap. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut ;

1. Jumlah PNS dan Non PNS Badan penanggulangan Bencana berjumlah 45 orang dengan rincian sesuai table berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	29	70,73
2	CPNSD	-	
3	Honorer	12	29,27
	Total	40	100

2. Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 3.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	19	-
3	Golongan II	6	-
4	Golongan I	-	-
5	Non Golongan	12	
	Total	41	-

b. Jabatan Struktural :

Tabel 3.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
	Jumlah	14

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 3.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	-	-
2	S2	4	13,79
3	S1	16	55,17
4	D3	1	3,45
5	SMA/Sederajat	8	27,59
6	SMP/Sederajat	-	-
7	SD/Sederajat	-	-
	Total	29	100

Berdasarkan analisa kebutuhan personil bagi instansi, jumlah personil tersebut masih terbatas untuk melayani kebutuhan masyarakat , Analisa kebutuhan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Sudah Terisi	Belum Terisi	Keterangan
1.	Kepala Pelaksana	√		
2.	Sekretaris	√		
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	√		
	Staf	√		
	b. Kasubag Keuangan	√		
	Staf	√		
	c. Kasubag Program	√		
	Staf	√		
3.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	√		
	a. Kasi Pencegahan	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Kesiapsiagaan	√		
	Staf	√		
4.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	√		
	a. Kasi Tanggap Darurat	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Logistik	√		
	Staf	√		
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	√		
	a. Kasi Rehabilitasi	√		
	Staf	√		
	b. Kasi Rekonstruksi	√		
	Staf	√		

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program kerja BPBD;

2. Kurangnya Tenaga /Personil sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa diselesaikan dengan cepat sehinggamenghambat semua kegiatan;
3. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas – tugas pasca bencana
4. Kurangnya sarana prasarana pendukung

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Koordinasi yang masih parsialdengan beberapa stakeholder sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
2. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal terutama pada fungsi pemadam kebakaran;
3. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas belum terwujud dengan baik;
5. Keterlambatan pencairan dana terutama dana tak tersangka sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kedaruratan bagi korban bencana.

2.3.3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuandaerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
2. Belum adanya pemahaman yang sama terhadap penanggulangan bencana menyebabkan terhambatnya pencapaian sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang mandiri

2.3.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Tantangan

- Terjadinya ancaman bencana yang cukup tinggi
- Terjadinya bencana banjir yang cukup besar sehingga menyebabkan kerusakan dan kerugian hampir di semua sektor
- Sarana Prasarana pendukung kelancaran pekerjaan pelayanan kurang memadai
- Pendanaan masih kurang memadai
- Masih adanya ego sektoral atau penanganan masih sektoral

Peluang

- Semangat mau bekerja sangat tinggi
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang terbukti dengan lahirnya Perda Penanggulangan Bencana yang tertuang di dalamnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana minimal 1 % dari belanja langsung APBD untuk anggaran penanggulangan bencana
- Kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitasnya
- Adanya dukungan dari SKPD terkait dalam menyelesaikan tugas tugas pelayanan kedaruratan
- Terbentuk dan aktifnya Forum PRB " Matenggo" Kota Bima dan TSBK di 20 Kelurahan.
- Mulai adanya keikutsertaan Lembaga usaha dalam rangka penanggulangan bencana yang dulu hanya focus pada tanggap darurat akan tetapi sekarang mulai memperhatikan program – program penanganan pra dan pasca bencana
- Mulai banyaknya perhatian Kementerian/ lembaga dan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk menata kembali Kota pasca bencana banjir

Kekuatan

- Dukungan dan persetujuan Pemerintah terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang relative baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintah Kota Bima melalui Tim Teknis dan Tim Koordinasi SKPD Terkait Kota Bima;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk majudan penuhtanggung jawab;
- Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2010 tentang pembentukan BPBD Kota Bima
- Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bima
- Adanya legalisasi Peraturan walikota Bima tentang pemanfaatan dana tak terduga
- Adanya legalisasi peraturan Walikota Bima tentang pedoman Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari belanja langsung APBD
- Adanya Legalisasi Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

Kelemahan

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan BPBD terutama kegiatan Pasca Bencana
- Kurangnya kuantitas dan kualitas keterampilan Pegawai, baik yang profesional secara teknis maupun operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Masih kurangnya aturan – aturan turunan daerah tentang penanggulangan bencana, baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana

2.3.5. Isu-Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima

- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha – usaha pengurangan risiko bencana
- Masih kurangnya legitimasi hukum peraturan –peraturan turunan Peraturan daerah Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mengatur tata kelola manajemen pengurangan resiko bencana di Daerah
- Masih kurangnya dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana
- Terbatasnya anggaran Penanganan Pasca Bencana mengingat biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sangat besar

2.3.6. Rekomendasi – rekomendasi dan catatan strategis

- Perlunya peningkatan SDM aparatur, Tim Penanggulangan Bencana dan masyarakat melalui Pelatihan structural, pelatihan fungsional, penyuluhan penanggulangan bencana dan pelatihan dan gladi/simulasi bencana.
- Mendorong pelaksanaan Rencana aksi daerah penanggulangan bencana yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Bima tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir tanggal 21 dan 23 Desember 2016 dalam rangka meningkatkan komitmen semua pihak baik swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana (Pra bencana , Tanggap darurat dan pasca bencana);

- Memperbesar anggaran penanggulangan bencana terutama pada program – program Pengurangan Risiko Bencana karena investasi yang besar pada program pengurangan risiko bencana akan dapat menghemat anggaran 4 – 7 kali lipat dibandingkan biaya yang keluar untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian jika bencana telah terjadi
- Perlunya pengintegrasian yang maksimal terhadap program Pengurangan Risiko Bencana kedalam RKPD Kota Bima sebagai upaya mengurangi dampak bencana mengingat tingginya ancaman bencana di Kota Bima terutama bencana banjir dan tanah longsor
- Terus melakukan program menuju ketangguhan bencana sebagai upaya peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat ditingkat paling bawah dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana.
- Terus melakukan koordinasi sektoral untuk meningkatkan upaya – upaya baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2013 – 2018 yang sedang berjalan, berdasarkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan menyesuakannya dengan Rencana Pembangunan selanjutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD yang kemudian setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan menjadi acuan penyusunan RKPD. Terkait dengan Program kerja pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, RPJMD tahun 2014-2018 secara signifikan telah menetapkan Program Pengurangan Risiko Bencana pada Program prioritas Daerah, Di Dalam dokumen Draf RKPD tahun 2018 telah menuangkan program penanggulangan bencana sebagai program prioritas ke 8 yaitu ***Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan penanganan perubahan iklim***, hal ini menjadi catatan bagi BPBD sebagai leading sector terkait penanggulangan bencana harus berjuang keras untuk mendukung dengan langkah – langkah program yang sangat strategis dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat baik sebelum, saat bencana maupun pasca bencana.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sampai dengan tahun 2018 Badan Penanggulangan bencana daerah telah banyak menerima usulan program dan kegiatan Masyarakat baik yang secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Pembentukan kelurahan tangguh maupun melalui Surat dan Proposal, Hasil kunjungan Dewan dan Pertemuan Forum SKPD. Berdasarkan hasil pertemuan forum SKPD dalam rangkaian musrembang untuk sinkronisasi program butem up dan top down, sebagian besar program yang diajukan masyarakat dapat terakomodir dalam program Renja BPBD ini mengingat isu – isu yang diangkat hampir sama namun belum terpenuhi hingga 100%. Selain itu program pembentukan kelurahan tangguh yang dilaksanakan sejak tahun 2014 telah melahirkan Dokumen rencana aksi masyarakat, dimana dokumen tersebut memuat program dan kegiatan pengurangan risiko bencana terutama pada kelurahan yang telah terbentuk menjadi kelurahan tangguh. Sebagian besar rencana aksi masyarakat tersebut telah disampaikan melalui musrembang tingkat Kelurahan maupun tingkat kecamatan dan menjadi issue penting yang ditindak lanjuti BPBD melalui rencana kerja ini.

Program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah antara lain :

1. Program Penanganan bencana banjir yang kerap terjadi dan sering menggenangi disebagian besar Wilayah Kota Bima;
2. Bronjongisasi di sepanjang sungai : seperti Wilayah Manggemaci, Paruga (Sungai Padolo), Wilayah Dodu (Sungai Dodu), Wilayah SambinaE (Sungai SambinaE);
3. Perbaikan Drainase di Sebagian besar Wilayah Kota Bima.
4. Pembuatan sumur resapan di beberapa lokasi rawan banjir dan kekeringan.
5. Normalisasi sungai Padolo, sungai romo, Sungai Dodu dll.
6. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
7. Pembangunan drainase
8. Penanganan darurat bencana yang terjadi seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin kencang dll
9. Penghijauan di daerah hulu

Program dan kegiatan yang bersifat fisik adalah merupakan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan SKPD teknis seperti Dinas PU Pertamben, Dinas kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota dan Perumahan dan dinas teknis terrkait lainnya, sehingga tugas BPBD Kota bima adalah mengkoordinasikan tugas tugas tersebut dengan SKPD terkait sedangkan tugas

penanggulangan bencana non fisik didorong untuk masuk menjadi rencana kerja BPBD tahun 2018 yang tertuang dalam matriks rencana kerja ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJMN Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2014-2018 maka tujuannya adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana dan terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi kondisi bencana
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan Tim penanggulangan bencana dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat

3. Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Meminimalisir risiko akibat bencana
5. Terkoordinasinya pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

3.2.2. SASARAN STRATEGIS

Di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditempuh melalui 5 (lima) sasaran strategi yaitu :

- a. Meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam penanganan risiko bencana
- b. Meningkatnya kapasitas aparatur dan tim penanggulangan bencana
- c. Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh
- d. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat
- e. Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Kinerja BPBD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dan sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan tahun 2018 maka ditetapkan rencana kinerja BPBD tahun 2014-2018 sesuai tabel berikut :

RENCANA KINERJA BPBD TAHUN 2014-2018

VISI	MISI	TUJUAN MISI	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN MISI				TARGET					TARGET PENCAPAIAN		
				SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	Target Renstra	% capaian tahun 2016	% Capaian tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN MANDIRI MELALUI PENANGANAN AN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT	Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan peran serta stakeholder penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana	Meningkatkan Ketangguhan Kota	Kriteria Kota Tangguh	Meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam Penanganan Risiko Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana Pratama	%	15	39	53	66	100	100	100	103,636
	Meningkatkan Kaasitas SDM Aparatur dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana	Persentase SDM Terlatih	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tim Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang terlatih	orang	150	180	180	180	180	870	384,44	186,111
	Meningkatkan Koordinasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait	Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh	Persentase Keselarasan Pedoman Penanggulangan Bencana	Tersedianya pedoman dalam penanggulangan bencana yang terencana terpadu dan menyeluruh	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersedia	Tersedianya dokumen RPB, Dokumen Renkon setiap bencana, SOP Kedaruratan dll	Dokumen	3	2	1	1	1	8	100	100

	Terwujudnya Penanggulangan Kedaruratan secara cepat, tepat, efektif, terkoordinir dan terpadu	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepat	Persentase Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana secara cepat dan tepa	Porsentase pemenuhan kebutuhan dasar saat bencana	Jumlah korban bencana yang dapat dibantu emenuhan kebutuhan dasarnya dibagi jumlah korban	%	100	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang saat bencana	Jumlah sarana dan prasarana penunjang saat bencana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang harus ada x 100 %	%	-	-	-	80	85	85	70	100
	Terwujudnya Pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik di Wilayah Pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh	Terseleenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan rasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca benca	Terwujudnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan rasarana fisik dan non fisik pasca bencana	%	50	60	70	80	90	90	22	32
Rata - rata Pencapaian														125,35	103,11

3.3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan rencana kinerja dan indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima serta telaahan isu – isu strategis serta rekomendasi - rekomendasidan catatan strategis maka dapat tindaklanjuti melalui 14 program dan 44 kegiatan selama tahun 2018.

Program pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana
6. Program Penanggulangan bencana/ pencegahan bencana
7. Program peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
8. Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
9. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Program Rehabilitasi
11. Program Rekonstruksi
12. Program Kesiapsiagaan:
13. Program Peringatan Dini.
14. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Program dan kegiatan dapat dilihat pada Matrik Rencana Kerja BPBD Kota Bima Tahun 2018 pada lampiran RENJA ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance*.

Raba – Bima, Februari 2018
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima,

Ir. H. Sarafuddin, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19640715 199203 1 017

